

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan pembangunan sektor ekonomi, yang satu dan yang lainnya saling berkaitan langsung dengan berbarengan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar anak menjadi dewasa.

Berbicara tentang proses pendidikan sudah tentu tidak dapat dipisahkan dengan semua upaya yang harus dilakukan dengan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas itu, dilihat dari segi pendidikan, telah terkandung secara jelas dalam tujuan pendidikan nasional.¹

Standar Nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan standar yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pendidikan. Salah satu standar yang dikembangkan oleh bidang kurikulum

¹ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara 2008) Cet.1 h. 1

adalah membelajarkan peserta didik sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi kelulusan.

Dalam rangka membantu peserta didik mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan, pelaksanaan atau proses pembelajaran perlu diusahakan agar inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan kesempatan yang cukup bagi peserta didik agar kreatif dan mandiri sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.

Dalam Surat Keputusan Mendiknas No.045/U/2002 tentang Pelaksanaan Pendidikan Tinggi Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi menuntut adanya kecerdasan yang bertanggung jawab serta adanya pengakuan dari masyarakat. Guru pembimbing memiliki standar kualifikasi tertentu, sehingga memenuhi standar kompetensi sebagai guru pembimbing atau konselor. Kompetensi tersebut membentuk guru pembimbing menjadi efektif, kredibel dan legitimed, sesuai Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal.

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 84/ 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BAKN No. 0433/1993 dan No. 25 tahun 1993 serta

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 025/0/1995 yang keduanya merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Surat Keputusan. No. 84/1993 itu, maka kedudukan dan fungsi pelayanan bimbingan konseling di sekolah semakin jelas dan mantap. Guru pembimbing sebagai pelaksana kegiatan bimbingan konseling di sekolah berkewajiban melaksanakan berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan konseling terhadap siswa siswi yang menjadi tanggung jawabnya.²

Di sekolah, kegiatan bimbingan konseling diselenggarakan oleh pejabat fungsional yang secara resmi dinamakan guru pembimbing. Dengan demikian, kegiatan bimbingan konseling di sekolah merupakan kegiatan atau pelayanan fungsional yang bersifat profesional atau keahlian dengan dasar keilmuan dan teknologi.³

Bimbingan konseling merupakan pelayanan dari manusia oleh manusia dan untuk manusia, artinya pelayanan itu diselenggarakan berdasarkan hakekat keberadaan manusia dengan segenap dimensi kemanusiaannya. Untuk manusia, dimaksudkan bahwa dalam pelayanan-pelayanannya diselenggarakan demi tujuan yang agung, mulia dan positif bagi kehidupan kemanusiaan yang seutuhnya, baik manusia sebagai individu maupun kelompok. Oleh manusia mengandung pengertian penyelenggaraan kegiatan itu adalah dengan segenap

² Prayitno, *Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok*, (Jakarta, Tahun 1995) h. 34

³ Prayitno, *Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2001), Cet.1 hal.1

derajat, martabat dan keunikan masing-masing yang terlibat di dalamnya. Proses bimbingan konseling seperti itu melibatkan manusia dan kemanusiaannya sebagai totalitas, yang menyangkut segenap potensi-potensi, kecenderungan-kecenderungan, perkembangannya, dinamika kehidupannya, dan interaksi dinamis antara berbagai unsur yang ada itu.⁴

Bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok agar bisa berkembang secara optimal, dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Bimbingan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematis dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, perkembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Semua perubahan perilaku-perilaku tersebut merupakan proses perkembangan individu, yakni proses interaksi yang sehat dan produktif. Bimbingan konseling memegang tugas dan tanggung jawab yang penting untuk mengembangkan lingkungan, membangun interaksi yang dinamis antara individu dengan lingkungan, membelajarkan individu untuk mengembangkan, merubah dan memperbaiki perilaku.

⁴ Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, tahun 2004) Cet.2 hal. 92

Dalam mewujudkan pelayanan bimbingan konseling yang baik, perlu adanya pengelolaan waktu yang efektif, manajemen diperlukan dalam pelayanan bimbingan dan konseling untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, serta untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pada akhir tujuan pelayanan bimbingan di sekolah. Pola manajemen disusun dengan kesesuaian antara konsep dengan kondisi yang dihadapi sekolah. Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pekanbaru (SMK Negeri 4 Pekanbaru) proses pelaksanaan kegiatannya kurang terarah sebagai mana mestinya. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling tidak berjalan secara optimal dikarenakan keterbatasan waktu yang didapat. Di dalam fenomena yang terjadi di lapangan, tepatnya SMK Negeri 4 Pekanbaru penulis menemukan berbagai gejala, di antaranya adalah :

1. Tidak diberikannya waktu khusus untuk layanan bimbingan konseling.
2. Guru pembimbing kurang mampu memanfaatkan waktu yang tersedia.
3. Kurangnya respon dari pihak sekolah untuk mengoptimalkan pelayanan bimbingan konseling.
4. Kurangnya pemahaman personil sekolah layanan bimbingan konseling.
5. Adanya opini dari personil sekolah bahwa peran bimbingan konseling tidak ada.
6. Hasil dari kegiatan bimbingan konseling tidak pernah menarik perhatian.

Berdasarkan gejala di atas oleh karena itu maka penulis mengangkat judul penelitian dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Waktu Pelayanan Bimbingan Konseling (Studi Kasus di SMK Negeri 4 Pekanbaru)”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian ini adalah:

1. Efektivitas

Menurut bahasa efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effektive*” yang berarti berhasil guna atau tercapainya sesuatu pekerjaan/ perbuatan yang direncanakan dapat terlaksana atau tercapai.⁵

Efektivitas adalah syarat yang menunjukkan tercapainya suatu tujuan. Pengertian yang dimaksud dalam kajian ini adalah: seberapa jauh pihak sekolah berhasil mengefektivitas pengelolaan waktu pelayanan bimbingan konseling di sekolah yang sesuai kepada tujuan yang diharapkan.

Menurut istilah efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan sejauh mana yang direncanakan dapat terlaksana atau tercapai. Jadi efektivitas bisa dikatakan dengan pemanfaatan moment yang diberikan agar tercapainya tujuan yang telah disusun.

2. Pengelolaan waktu

Pengelolaan waktu di sini dapat diartikan manajemen waktu yang mengatur pola waktu yang ada di setiap instansi. mencakup *planning*,

⁵ Plus Abdullah. *Kamus 10 Juta, Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris* (Surabaya: Arkola, 1980) hal. 124

organizing, actuating, dan controlling. Jadi pengelolaan waktu bisa diartikan manajemen waktu yang tepat untuk mendapatkan hasil maksimal.

3. Pelayanan bimbingan konseling

Layanan bimbingan konseling merupakan suatu kegiatan bimbingan konseling yang dilakukan melalui kontak langsung dengan sasaran layanan, dan secara langsung berkenaan dengan permasalahan ataupun kepentingan tertentu yang dirasakan oleh sasaran layanan tersebut. Kegiatan yang merupakan layanan bimbingan konseling mengemban fungsi tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh sasaran layanan secara langsung.

C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah bahwa persoalan pokok kajian ini adalah pengelolaan waktu yang kurang efektif dalam pelayanan bimbingan konseling. Berdasarkan pokok persoalan tersebut, maka persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Tidak ada waktu khusus untuk pelayanan bimbingan konseling.
- b. Kurangnya respon dari pihak kepala sekolah untuk mengoptimalkan pelayanan bimbingan konseling.
- c. Minimnya upaya guru pembimbing untuk mengoptimalkan layanan bimbingan konseling.

- d. Kurangnya pemahaman oleh personil sekolah akan kebutuhan bimbingan konseling.

2. Pembatasan masalah

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian ini. Seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis memfokuskan pada efektivitas pengelolaan waktu yang kurang efektif oleh guru pembimbing dan faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan waktu pelayanan bimbingan konseling yang kurang efektif di SMKNegeri 4 Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Relevan dengan batasan masalah di atas, masalah dalam kajian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas pengelolaan waktu pelayanan bimbingan konseling di SMK Negeri 4 Pekanbaru?
- b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan waktu pelayanan bimbingan konseling di SMK Negeri 4 Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan efektivitas pengelolaan waktu pelayanan bimbingan konseling di SMK Negeri 4 Pekanbaru.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan waktu pelayanan bimbingan konseling di SMK Negeri 4 Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai informasi bagi SMK Negeri 4 Pekanbaru tentang pengelolaan waktu pelayanan bimbingan konseling.
- b. Sebagai informasi bagi jurusan Bimbingan konseling Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Suska Riau.
- c. Sebagai pengembangan ilmu Bimbingan Konseling sesuai dengan jurusan penulis.

Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan akademik penulis.